

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Djaja, Ermasjah, 2008, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fajar, Mukti and Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Gunarto, Marcus Priyo, 2007, *Perkembangan Unsur Delik Korupsi*, Marginal Press, Yogyakarta.
- Henianti, Dini Dewi, 2017, *Sistem Peradilan Militer Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Indrayana, Denny, 2016, *Jangan Bunuh KPK*, Intrans Publishing, Malang.
- Kanter, EY and S.R Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Mochtar, Zainal Arifin and Eddy OS Hiariej, 2018, *Menjerat Korupsi Partai Politik*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mulyana, Asep N, 2020, *Hukum Pidana Militer Kontemporer*, PT Grasindo, Jakarta.
- Salam, Moch Faisal, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Seno Adji, Indriyanto, 2016, *Pengujian Oleh Publik Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono and Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Syamsyudin, M., 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo

Persada, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2002 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 197 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5074).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6755).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 238).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228 Tahun 1967 tentang Pembentukan Team Pemberantasan Korupsi dengan Tugas, Fungsi dan Susunan.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara.

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi.

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi.

C. Jurnal, Tesis, Makalah

AF, M Abdul Kholiq, “Eksistensi KPK dalam Peradilan Korupsi di Indonesia”, *Jurnal Hukum*, Vol. 11, No. 26, 2004.

Alkotsar, Artidjo, “Mengkritisi Fenomena Korupsi di Parlemen”, *Jurnal Hukum*, Vol. 15, No. 1, 2008.

Ansori, Lutfil, “Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 4, No. 2, 2017.

Ardiansyah, Andri, “Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia”, *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Riau*, Vol. 7, No. 1, 2020.

Atno and Nanda Julian Pratama, “Dari Rakyat Untuk Rakyat : Benih, Cikal-Bakal dan Kelahiran Tentara Indonesia 1945-1947”, *Jurnal of Indonesian History*, Vol. 7, No. 1, 2018.

Badu, Lisnawaty W and Apripari, “Menggagas Tindak Pidana Militer Sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Militer dalam Perkara Pidana”, *Jurnal Legalitas*, Vol. 14, No. 1, 2019.

Buaton, Tiarsen, 2016, *Peradilan Militer di Indonesia di Bawah Kekuasaan Mahkamah Agung*, Pustaka Kemang, Jakarta.

d’Agostino, Giorgio, J. Paul Dunne, Marco Lorusso, and Luca Pieroni, “Military Spending, Corruption, Persistence and Long Run Growth”, *Defence and Peace Economics*, Vol. 31, No. 4, 2020.

Dwipayana, Soma and I Gusti Ketut Ariawan, “Reformulasi Pembentukan Kewenangan Jaksa Agung Muda Pidana Militer dalam Penanganan Perkara Pidana Militer di Indonesia”, *Kertha Semaya*, Vol. 9, No. 3, 2021.

- Hiariej, Eddy OS, “United Nations Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 31, No. 1, 2019.
- J.S, Nye, “Corruption and Political Development: A Cost-Benefit Analysis”, *The American Political Science Review*, Vol. 61, No. 2, 1967.
- Jauzi, Faiqbal, 2019, “Wewenang KPK dalam Sidang Koneksitas Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Prajurit TNI”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Muqorrobin, Hasymi, 2016, “Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi oleh Anggota TNI”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
- Muhsin, M. Fakhri, 2020, Pelibatan Tentara Nasional Indonesia dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, *Skripsi*, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Nandita, Ni Nengah Dhea Riska Putri, 2021, Urgensi Pemeriksaan Bedah Mayat dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan, *Skripsi*, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Nazriyah, R, “Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penyidikan Kasus Simulator SIM (Kapolri vs KPK)”, *Ius Quia Iustum*, Vol. 19, No. 4, 2012.
- Noor, Hendry Julian, 2018, Kerugian Keuangan Negara dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perseroan Terbatas Perspektif Hukum Bisnis dan Tindak Pidana Korupsi, *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Pabalik, Daeng, Muhammad Hatta, Nur Hidayat, Muhammad Rinaldy Bima, and Hardianto Djanggih, “Characteristics of Criminal Acts of Corruption in Indonesia”, *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, Vol. 24, No. 8, 2020.
- Prihastuti, Adelia, “Kemitraan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) Dalam Penguatan Gerakan Antikorupsi di Indonesia : Kasus Penguatan Civil Society Tingkat Lokal (2016-2017)”, *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 8, No. 3,

2019.

Rahardjo, Pamoe, “Badan Keamanan Rakyat : Cikal Bakal Tentara Nasional Indonesia”, *Majalah Peta*, 1995.

Rahmanul, Rahmanul and Adianto Adianto, “Peran KPK dalam Menangani Kasus Korupsi di Indonesia”, *FisiPublik : Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Vol. 5, No. 1, 2020.

Rifani, Aulia Jihan and Satria Unggul Wicaksana, “Independensi Peradilan Militer Terhadap Prajurit TNI sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika”, *Audito Comparative Law Journal*, Vol. 2, No. 3, 2021.

Santoso, Listiyono, Dewi Meyriswati, and Ilham Nur Alfian, “Korupsi dan mentalitas: kendala kultural dalam pemberantasan korupsi di Indonesia”,

Sanusi, H.M Arsyad, “Relasi Antara Korupsi dan Kekuasaan”, *Konstitusi*, Vol. 6, No. 2, 2009.

Sartor, Michael A. and Paul W. Beamish, “Private Sector Corruption, Public Sector Corruption and the Organizational Structure of Foreign Subsidiaries”, *Journal of Business Ethics*, Vol. 167, No. 4, 2020.

Sherlock, Stephen, “Combating corruption in Indonesia? The ombudsman and the assets auditing commission”, *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 38, No. 3, 2002.

Sosiawan, Ulang Mangun, “Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 19, No. 4, 2019. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, Vol. 27, No. 4, 2014.

Suryandoko, Rony, “Strategi dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Untuk Penguatan Sistem Peradilan Militer”, *Jurnal Strategi Pertahanan Darat*, Vol. 4, No. 2, 2018.

Suyatna, Uyat, “EVALUASI KEBIJAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA”, *Sosiohumaniora*, Vol. 22, No. 3, 2020.

Tagarev, Todor, “Enabling Factors and Effects of Corruption in the Defense Sector”, *Connections: The Quarterly Journal*, Vol. 09, No. 3, 2010.

Tiku, Imanuel Arung, “Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi

Yang Dilakukan oleh Pejabat TNI”, *Lex Crimen*, Vol. 9, No. 2, 2020.

Wigen, Leonardo, 2018, Penerapan Hukum Acara Pidana dalam Penyidikan Perkara Pidana Koneksitas, *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Zulherawan, Muhammad, “Tindak Kejahatan Korupsi White Collar Crime Model Trend Dan Penyebabnya”, *SISI LAIN REALITA*, Vol. 4, No. 1, 2019.

D. Laporan

International Monetary Fund, 1998, *Corruption Around The World : Cauases Consequences, Scope and Cures*.

Komisi Pemberantasan Korupsi, 2016, *Laporan Tahunan KPK Tahun 2016*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.

Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017, *Laporan Tahunan KPK Tahun 2017*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.

Komisi Pemberantasan Korupsi, 2018, *Laporan Tahunan KPK Tahun 2018*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.

Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019, *Laporan Tahunan KPK Tahun 2019*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.

Komisi Pemberantasan Korupsi, 2020, *Laporan Tahunan KPK Tahun 2020*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.

Transparency International, 2015, *Government Defence Anti-Corruption Index*, London.

Transparency International, 2019, *Corruption Perceptions Index 2018*.

E. Internet

Indonesia Corruption Watch, “Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2020”, <https://www.antikorupsi.org/id/article/tren-penindakan-kasus-korupsi-tahun-2020>, diakses pada September 29, 2021.

Irfan Kamil, Kasus Helikopter AW101 Dihentikan TNI Hingga Keyakinan KPK Akan Adanya Tindak Pidana Korupsi, <https://nasional.kompas.com/read/2021/12/31/06300751/kasus->

*helikopter-aw-101-dihentikan-tni-hingga-keyakinan-kpk-akan-
adanya?page=all*, diakses pada 22 Maret 2022.

Kementerian Pertahanan, "Media Informasi Kementerian Pertahanan",
[https://www.kemhan.go.id/wp-content/uploads/2016/03/5.-September-
Oktober-2015.pdf](https://www.kemhan.go.id/wp-content/uploads/2016/03/5.-September-Oktober-2015.pdf), diakses pada September 30, 2021.

Ramadhan, Ardito, "Kasus Jaksa Pinangki KPK Belum Terima Permohonan Koordinasi dan Supervisi",
[https://nasional.kompas.com/read/2020/08/31/18031381/kasus-jaksa-
pinangki-kpk-belum-terima-permohonan-koordinasi-dan-supervisi](https://nasional.kompas.com/read/2020/08/31/18031381/kasus-jaksa-pinangki-kpk-belum-terima-permohonan-koordinasi-dan-supervisi),
diakses pada 30 Maret 2022.

Transparency International, "Corruption Perceptions Index 1998"
<https://www.transparency.org/en/cpi/1998>, diakses pada 9 Oktober 2021

Transparency International, "Corruption Perceptions Index 1999"
<https://www.transparency.org/en/cpi/1999>, diakses pada 9 Oktober 2021

Transparency International, "Government Defence Anti-Corruption Index",
<https://government.defenceindex.org/countries/indonesia/>, diakses pada 1
Oktober 2020

Wilda Hayatun Nufus, "Kasus Korupsi Tabungan Wajib Perumahan TNI AD Brigjen YAK Segera Di Sidang", [https://news.detik.com/berita/d-
5929725/kasus-korupsi-tabungan-wajib-perumahan-tni-ad-brigjen-yak-
segera-disidang](https://news.detik.com/berita/d-5929725/kasus-korupsi-tabungan-wajib-perumahan-tni-ad-brigjen-yak-segera-disidang), diakses pada 22 Maret 2022.